



PERUBAHAN RENCANA

STRATEGIS

2021-2026



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Rembang pada masa yang akan datang memegang peranan yang sangat penting. Hal ini berdasarkan kondisi bahwa sekitar 321.284 jiwa (52,45%) dari 612.552 jiwa penduduk Kabupaten Rembang bertempat tinggal di kawasan pesisir yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan sumber penghidupannya pada potensi sumberdaya laut dan pesisir, maka banyak kawasan pesisir yang berkembang bagi berbagai kegiatan ekonomi lain selain bidang kelautan dan perikanan di antaranya usaha pariwisata, perhubungan, industri, perdagangan dan sebagainya.

Kawasan pesisir Kabupaten Rembang memiliki kekayaan sumberdaya alam yang besar karena didukung oleh adanya sumberdaya hayati dan non hayati yang bernilai tinggi, seperti terumbu karang, ekosistem mangrove/bakau, estuaria, harta karun muatan kapal tenggelam dan lain sebagainya. Sumberdaya alam tersebut telah memberikan kontribusi pendapatan bagi masyarakat di Kabupaten Rembang.

Saat ini pemanfaatan sumberdaya ikan di pantai perairan Kabupaten Rembang dirasakan telah melebihi *Maximum Sustainable Yield* (MSY) atau over fishing, dan telah berakibat pada menurunnya hasil tangkapan ikan (*Catch Per Unit Effort* (CPUE)). Kondisi yang demikian ini akan berdampak pada ekosistem pesisir di kawasan tersebut, karena untuk memenuhi kebutuhannya masyarakat kemudian melakukan upaya – upaya ekonomis pemanfaatan hutan mangrove maupun pengambilan karang, di samping upaya – upaya untuk mendapatkan hasil tangkapan lebih banyak dengan menerapkan praktek– praktek penangkapan yang illegal, seperti penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, dan juga racun ataupun bahan peledak yang dapat berdampak pada degradasi ekosistem pesisir.

Kesadaran masyarakat pesisir akan fungsi ekosistem wilayah pesisir sebagai biofilter alami yang sangat kaya dan bernilai dalam menjamin ketersediaan sumberdaya kelautan dan perikanan, pada umumnya belum tumbuh dan berkembang secara baik. Keadaan tersebut telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama sehingga telah

menimbulkan kerusakan ekosistem pesisir. Untuk itu dalam rangka pengelolaan dan menjaga kelestarian ekosistem pesisir perlu dilakukan upaya pengelolaan secara terpadu antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat serta melibatkan stakeholder terkait dan kelompok masyarakat yang mendapatkan keuntungan dari adanya sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah pesisir.

Rencana Strategis pengelolaan sektor Kelautan dan Perikanan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang mencakup; pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah, perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD Kabupaten Rembang yang menjadi tupoksi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang. Hal lain yang termaktub dalam Rencana Strategis ini adalah perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan serta perumusan indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rembang.

Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

I.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005– 2025.
7. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah.
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang 2005-2025.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 14 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang 2011-2031.

I.3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang (Review), secara sistematis adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINLUTKAN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinbudpar
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinbudpar.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran jangka Menengah

BAB V SRATATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengurai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

Memuat tentang penegasan fungsi Renstra yaitu berlaku sebagai acuan dan pedoman bagi setiap jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang serta sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan (stake holders)

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, maka struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang terdiri atas : Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Bidang Kenelayanan, Kepala Seksi Produksi dan Sarana Prasarana Kenelayanan, Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Kepala Seksi Produksi Budidaya, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya, Kepala Bidang Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing, Kepala Seksi Pengolahan dan Peningkatan Daya Saing, Kepala Seksi Kemitraan dan Pemasaran Produksi Perikanan serta Kepala UPT – TPI.

Di dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 tahun 2016 tersebut di atas, setiap pejabat struktural dalam lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang tersebut di atas memiliki tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya masing-masing, sebagaimana berikut :

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN :

Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Administrasi Kelautan dan Perikanan;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Administrasi Kelautan dan Perikanan;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang Administrasi Kelautan dan Perikanan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Administrasi Kelautan dan Perikanan;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIS :

Tugas Pokok :

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Fungsi :

1. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
4. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
5. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
6. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya

KEPALASUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN :

Tugas Pokok :

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan.

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN :

Tugas Pokok :

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan.

KEPALA BIDANG KENELAYANAN

Tugas Pokok :

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang produksi dan sarana prasarana kenelayanan serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan produksi dan sarana prasarana kenelayanan serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
2. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan produksi dan sarana prasarana kenelayanan serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;

3. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan produksi dan sarana prasarana kenelayanan serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai fungsinya.

KEPALA SEKSI PRODUKSI DAN SARANA PRASARANA KENELAYANAN

Tugas Pokok :

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi data dan informasi, usulan usaha perikanan dan sarana prasarana kenelayanan.

KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN

Tugas Pokok :

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi data dan informasi, pembinaan lingkungan pesisir nelayan serta akses data dan informasi tentang permodalan bagi nelayan.

KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

Tugas Pokok :

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang produksi budidaya serta sarana dan prasarana budidaya.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan produksi budidaya;
2. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan sarana dan prasarana budidaya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
3. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan budidaya dan produksi garam serta sarana dan prasarana budidaya;
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai fungsinya.

KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA BUDIDAYA

Tugas Pokok :

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi data dan informasi, pengembangan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian standar sarana dan prasarana budidaya, perbenihan dan produksi garam serta perijinan bidang budidaya sesuai batas kewenangan kabupaten.

KEPALA SEKSI PRODUKSI BUDIDAYA

Tugas Pokok :

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi data dan informasi, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan teknis, pembinaan dan pengembangan usaha pembudidayaan ikan, perbenihan dan produksi garam serta fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyakit ikan.

KEPALA BIDANG BINA USAHA DAN PENINGKATAN DAYA SAING

Tugas Pokok :

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengolahan dan peningkatan daya saing serta kemitraan dan pemasaran produk perikanan.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengolahan dan peningkatan daya saing serta kemitraan dan pemasaran produk perikanan;
2. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pengolahan dan peningkatan daya saing serta kemitraan dan pemasaran produk perikanan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
3. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengolahan dan peningkatan daya saing serta kemitraan dan pemasaran produk perikanan;
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai fungsinya.

KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PENINGKATAN DAYA SAING

Tugas Pokok :

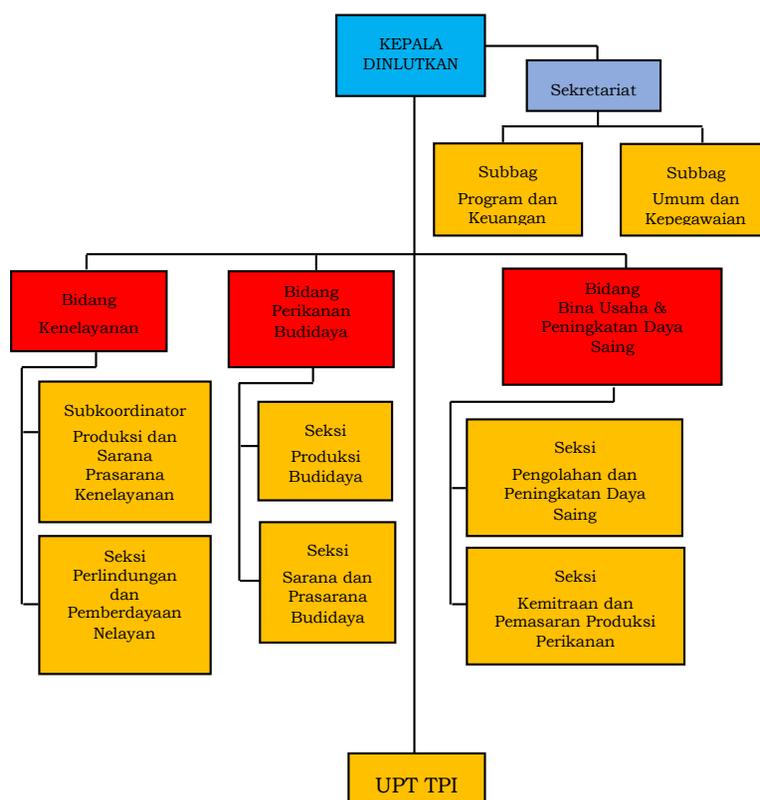
Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi data dan informasi, pengembangan mutu, standarisasi pengolahan dan peningkatan daya saing, sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan skala kecil dan perijinan usaha sesuai tingkatan.

KEPALA SEKSI KEMITRAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN

Tugas Pokok :

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi data dan informasi, promosi dan kemitraan serta pengembangan kelembagaan, permodalan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dapat dilihat pada gambar II.1. di bawah ini.



Gambar II.1.
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

II.2. Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang didukung dengan sumber daya yang meliputi sarana dan prasarana serta SDM (Sumber Daya Manusia) aparatur sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel II.1.
Sarana dan Prasarana
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

No.	Nama Aset	Alamat
1.	Kantor Dinas	Jl. Pemuda No. 82 Rembang
2.	TPI Tunggulsari	Desa Tunggulsari Kecamatan Kaliori
3.	TPI Tanjungsari	Desa Tanjungsari Kecamatan Rembang
4.	TPI Tasikagung 1	Desa Tasikagung Kecamatan Rembang
5.	TPI Tasikagung II	Desa Tasikagung Kecamatan Rembang
6.	TPI Pasarbanggi	Desa Pasarbanggi Kecamatan Rembang
7.	TPI Pandangan	Desa Pandangan Wetan Kecamatan Kragan
8.	TPI Pangkalan	Desa Pangkalan Kecamatan Kragan
9.	TPI Karanganyar	Desa Karanganyar Kecamatan Kragan
10.	TPI Karanglincak	Desa Karanglincak Kecamatan Kragan
11.	TPI Sarang	Desa Temperak Kecamatan Sarang
12.	BBI Pamotan	Jl. Raya Rembang Pamotan, Kecamatan Pamotan

Pada tabel II.1 di atas dapat dilihat jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang (sampai dengan tahun 2021).

Sarana kerja penunjang lain yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang adalah berupa sarana informasi portal berupa website dengan alamat akses <http://dinlutkan.rembangkab.go.id>, Email: dinlutkan@rembangkab.go.id, facebook: [dinlutkan_rembang](#); Twitter [@dinlutkan_rbg](#); Instagram [@dinlutkan_rembang](#); Sarana informasi ini

dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Rembang.

Di samping sarana dan prasarana, sumberdaya yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang adalah sumberdaya manusia (aparatur), baik yang berstatus PNS maupun Non PNS, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel – tabel berikut ini. Sumberdaya manusia ini dibagi berdasarkan jabatan, golongan dan pendidikan terakhir yang ditempuh oleh masing-masing pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

Tabel II.2.
SDM PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang
Berdasarkan Golongan (s/d 31 Desember 2021)

No.	Jabatan	PNS Golongan (Orang)				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2.	Sekretaris	1	-	-	-	1
3.	Kepala Bidang	3	-	-	-	3
4.	Kepala Sub Bagian		3	-	-	1
5.	Sub Koordinator		6		-	5
6.	Kepala UPT PPUP	-	1	-	-	1
7.	Staf/Fungsional Umum	-	11	13	-	20
	J u m l a h	5	21	13	0	37

Tabel II.3.
SDM PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang
Berdasarkan Pendidikan Terakhir (s/d 31 Desember 2021)

No.	Jabatan	PNS Pendidikan (Orang)						Jumlah
		S2	S1	D4	D3	SMU	SMP	
1.	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretaris	-	1	-	-	-	-	1
3.	Kepala Bidang	1	2	-	-	-	-	3
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	-	1	-	-	1
5.	Kepala Seksi	1	4	-	-	-	-	5
6.	Kepala UPT PPUP	-	1	-	-	-	-	1
7.	Staf/Fungsional Umum	-	10	2	1	11	1	25
	J u m l a h	3	18	2	2	11	1	37

Tabel II.4.
SDM Non PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang
Berdasarkan Pendidikan Terakhir (s/d 31 Desember 2021)

No.	Jabatan	PNS Pendidikan (Orang)						Jumlah
		S2	S1	D4	D3	SMU	SMP	
1.	Tenaga Harian Lepas	-	-	-	-	2	-	2
2.	Tenaga UPT-PPUP	-	3	-	-	-	-	3
J u m l a h		-	16	3	-	2	-	21

Dari tabel II.2 sampai dengan tabel II.4 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah karyawan/karyawati Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang seluruhnya berjumlah 80 orang yang meliputi PNS maupun Non PNS, dan sebagian besar berpendidikan sarjana di bidang kelautan dan perikanan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebutuhan SDM Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang sudah mencukupi.

Namun seperti halnya sarana dan prasarana, maka keberadaan PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang juga terpengaruh dengan adanya aturan baru di mana seluruh PNS yang berstatus sebagai Penyuluh Perikanan Lapangan (PPL) dan Pengawas Perikanan akan ditarik status kepegawaiannya ke Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan. Total jumlah penyuluh dan pengawas perikanan yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang berjumlah 22 orang. Oleh karena itu di masa mendatang diperlukan penambahan jumlah PNS yang mendukung kinerja dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

II.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang merupakan instansi Pemerintah Kabupaten Rembang yang mempunyai wewenang untuk mengelola potensi kelautan dan perikanan yang terdapat di Kabupaten Rembang. Pengelolaan potensi kelautan dan perikanan tersebut dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dengan dana yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Tengah, maupun dari APBN baik melalui DAK (Dana Alokasi Khusus), TP (Tugas Pembantuan) maupun Dekonsentrasi. Di samping itu ada pula kegiatan yang didanai

dari sumber dana DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau). Sumberdaya kelautan dan perikanan telah banyak memberikan manfaat dan kontribusi dalam pengembangan ekonomi masyarakat di Kabupaten Rembang. Namun demikian, manfaat pembangunan kelautan dan perikanan yang dinikmati saat ini belum secara optimal dirasakan oleh semua masyarakat Kabupaten Rembang, sehingga pembangunan kelautan dan perikanan perlu dipacu di berbagai daerah potensial untuk menjamin pencapaian manfaat yang optimal. Pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Rembang merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Rembang guna mewujudkan masyarakat Rembang yang mandiri dan sejahtera. Hal ini dikarenakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan memiliki aspek penting yang saling berinteraksi erat antara sistem ekonomi (*Economic System*), masyarakat (*Social System*) dan lingkungan hidup (*Ecosystem*).

Kabupaten Rembang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Hal ini ditandai dengan wilayah pantai Kabupaten Rembang sepanjang 63,5 km yang banyak terkandung berbagai potensi kekayaan hasil laut yang melimpah seperti sumberdaya jenis ikan dengan hasil tangkapan yang dominan dan bernilai ekonomis tinggi antara lain ikan Layang, Tembang, Tongkol, Bawal, Tengiri, Teri, Kakap, Cumi-cumi, Kurisi, Layur, Manyung dan Rajungan. Jenis-jenis ikan tersebut ditangkap dengan menggunakan jenis alat tangkap dan kapal yang berlainan sesuai dengan kesesuaian alat tangkap. Di samping itu Kabupaten Rembang juga mempunyai kawasan pesisir seluas 355,95 km² atau 35% dari luas wilayah Kabupaten Rembang. Di samping itu juga ada jenis – jenis ikan ekonomis tinggi yang dibudidayakan, di antaranya Lele, Nila, Tawes, Udang Vanamei, Udang Windu, Bandeng.

Tabel II.5.
Potensi Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Rembang

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
I. SDM PERIKANAN (orang)					
• Nelayan	24.968	25.208	25.363	25.256	25.456
• Bakul Ikan	1.523	1.526	1.531	1.529	1.528
• Tenaga Kerja Pengolah	21.671	21.381	21.134	21.153	17.383
• Pembudidaya Tambak	270	370	370	370	370
• Pembudidaya Kolam	912	912	912	912	912
II. SARANA PRODUKSI					
ARMADA					
A. PENANGKAPAN (Unit)					
• Kapal Motor Ukuran > 60 GT	157	157	95	95	95
• Kapal Motor Ukuran 30 – 60 GT	57	72	165	185	212
• Kapal Motor Ukuran 10 – 30 GT	875	875	745	745	783
• Kapal Motor Ukuran 5 – 10 GT	89	92	89	47	47
• Kapal Motor Ukuran < 5 GT	2.854	2.854	2.894	2.895	2.844
B. ALAT TANGKAP (Unit)					
• Purse seine	551	567	572	740	609
• Dogol	535	535	535	515	515
• Payang	18	18	18	18	-
• Cantrang	1.636	1.781	1.795	1.795	1.952
• Gill net	1.158	1.265	1.271	1.271	1.367
• Trammel net	1.667	1.659	1.659	1.659	1.719
• Pancing	121	-	-	121	121
• Bubu	1.636	1.781	1.795	1.795	1.952
• Alat lainnya	-	-	-	2.113	2.113
C. LUAS POTENSI (Ha)					
• Tambak	2.386,2	2.396,2	2.396,2	2.396,2	2.396,2
• Kolam	25,2	32,4	32,4	32,4	32,4
• Perairan Umum	253,6	253,6	253,6	253,6	253,6
D. SARANA BUDIDAYA (Unit)					
• BBI	1	1	1	1	1
• UPR	15	15	15	15	15

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
• HSRT	6	6	6	6	6
III. PRODUKSI (Kg)					
• Perikanan Tangkap	78.856.213	96.402.522	110.747.112	111.721.041	97.943.156
• Pengolahan Hasil Perikanan	193.908.519,75	169.952.064	168.263.821	130.499.245	133.304.979
• Perikanan Budidaya	6.454.940	6.286.757	6.452.320	6.588.959	6.721.482
• Garam	NA	NA	185.560.000	108.858.400	98.767.000

Disamping perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan, Kabupaten Rembang juga mempunyai potensi pulau-pulau kecil dan gugusan karangnya serta hutan bakau, sebagaimana berikut :

- a. Di wilayah perairan Kabupaten Rembang terdapat 19 terumbu karang yang tersebar di berbagai tempat yaitu antara lain : Karang Gondoh dengan (\pm 9 ha), Karang P. Marongan (60 ha), Karang P. Benowo (\pm 2,4 ha), Karang P. Gede (\pm 37 ha), Karang P. Cilik (\pm 7 ha), Karang P. Tubanan (\pm 1 ha), Karang P. Tapa (\pm 1 ha), Karang P. Pinggir (\pm 1 ha), Karang P. (\pm 19,6 ha), Karang P. Kelem (\pm 7,1 ha), Karang P. Wen-wen (\pm 4,2 ha), Karang P. Masaran (\pm 6,9 ha), Karang P. Dorangan (\pm 10 ha), Karang P. Seliro (\pm 6 ha), Karang Moro (\pm 6 ha), Karang P. Gurian (\pm 3,8 ha), Karang Siwalan (\pm 20 ha), Karang Jetak (\pm 21 ha), Karang Gosong (\pm 4,7 ha).
- b. Komunitas Mangrove yang terdapat di Wilayah Kabupaten Rembang cukup luas areal komunitas mangrove tersebar di tiga wilayah kecamatan yaitu : Kaliori, Rembang dan Lasem.
 - 1) Di Kecamatan Kaliori, Desa Tunggulsari panjang hamparan mangrove sekitar 2 km dengan tebal 20 meter dengan luas 4,2 ha.
 - 2) Di Kecamatan Rembang panjang hamparan mangrove sekitar 3 km dengan rata-rata ketebalan 50 meter dengan luas 60 ha.
 - 3) Di Kecamatan Lasem hamparan komunitas mangrove diperkirakan sepanjang 2,8 km dengan ketebalan 20 m diperkirakan seluas 15 ha.

Dengan besarnya potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki Kabupaten Rembang maka sebagai instansi yang menangani bidang perikanan dan kelautan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dituntut untuk berperan aktif dalam mengembangkan potensi tersebut sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Rembang. Salah satu peran aktif bidang kelautan dan perikanan dalam

peningkatan perekonomian daerah Kabupaten Rembang adalah melalui penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Rembang dari hasil retribusi TPI, BBI Pamotan, sewa gudang kios dan juga sewa basket dan jasa es. Dalam Tabel II.6 berikut ini dapat dilihat besarnya jumlah retribusi dari bidang kelautan dan perikanan yang disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Rembang selama kurun waktu 2011 – 2015.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa besarnya retribusi tersebut fluktuatif, dengan kecenderungan terjadi peningkatan setiap tahunnya. Retribusi ini diperoleh dari prosentase hasil raman/nilai produksi ikan yang dilelangkan di TPI berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Rembang.

Sedangkan target dan realisasi dari produksi maupun nilai produksi bidang kelautan dan perikanan selama tahun 2011 – 2015 yang meliputi perikanan laut, perairan umum, budidaya kolam, budidaya tambak, pengolahan serta usaha garam rakyat, dapat dilihat pada tabel II.7.

Dari tabel II.7 tersebut dapat dilihat bahwa dari target produksi dan nilai produksi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang tahun 2011 – 2015 telah dapat dicapai, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Bahkan untuk kegiatan budidaya, realisasi produksi dan nilai produksi untuk kegiatan budidaya tambak maupun budidaya kolam jauh melebihi target dan dapat dikatakan sangat signifikan. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan pengembangan budidaya udang Vanamei yang relative lebih tahan dari serangan hama maupun kondisi perairan tambak yang kurang mendukung dibandingkan dengan udang Windu.

Tabel II.6.
Hasil Retribusi dari Sektor Kelautan dan Perikanan 2017 – 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Retribusi TPI (Rp.)					
	- TPI Sarang	4.359.041.940,50	3.339.925.117,50	2.828.614.132,50	2.674.514.077,50	3.299.965.710,00
	- TPI Karanganyar	2.562.611.415,00	2.659.038.600,00	1.507.841.085,00	1.336.357.335,00	1.314.967.170,00
	- TPI Karang Lincak	350.550,00	527.250,00	761.000,00	280.000,00	3.880.000,00
	- TPI Pandangan	1.199.110.425,00	1.356.433.275,00	1.084.448.580,00	1.339.791.420,00	2.002.614.190,00
	- TPI Pangkalan	1.311.000,00	1.482.000,00	1.157.500,00	735.000,00	493.500,00
	- TPI Pasar Banggi	3.813.300,00	5.035.950,00	34.395.370,00	2.586.500,00	3.494.700,00
	- TPI Tasikagung I	1.959.153.355,50	2.445.742.319,50	1.340.932.529,50	1.075.742.770,50	1.126.804.582,50
	- TPI Tasikagung II	1.523.477.190,00	1.806.312.900,00	2.008.541.470,00	1.860.815.600,00	1.728.080.900,00
	- TPI Tanjungsari	107.562.697,00	32.901.254,00	2.807.370,00	1.472.370,00	1.811.350,00
	- TPI Tunggulsari	4.214.580,00	14.052.210,00	4.157.210,00	1.926.400,00	3.307.360,00
2.	BBI Pamotan (Rp.)	15.000.000,00	15.050.000,00	20.500.000,00	21.000.000,00	20.000.000,00
3.	Sewa Gudang dan Kios	334.019.641,00	345.287.841,00	297.729.358,00	323.781.776,00	-
4.	Sewa Basket & Jasa Es	56.416.000,00	171.442.000,00	162.551.000,00	165.035.000,00	136.392.000,00
	J u m l a h	12.126.082.094,00	12.193.230.717,00	9.264.436.605,00	8.804.038.249,00	9.641.811.462,50

Tabel II.6.
Hasil Retribusi dari Sektor Kelautan dan Perikanan 2017 – 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Retribusi TPI (Rp.)					
	- TPI Sarang	4.359.041.940,50	3.339.925.117,50	2.828.614.132,50	2.674.514.077,50	3.299.965.710,00
	- TPI Karanganyar	2.562.611.415,00	2.659.038.600,00	1.507.841.085,00	1.336.357.335,00	1.314.967.170,00
	- TPI Karang Lincak	350.550,00	527.250,00	761.000,00	280.000,00	3.880.000,00
	- TPI Pandangan	1.199.110.425,00	1.356.433.275,00	1.084.448.580,00	1.339.791.420,00	2.002.614.190,00
	- TPI Pangkalan	1.311.000,00	1.482.000,00	1.157.500,00	735.000,00	493.500,00
	- TPI Pasar Banggi	3.813.300,00	5.035.950,00	34.395.370,00	2.586.500,00	3.494.700,00
	- TPI Tasikagung I	1.959.153.355,50	2.445.742.319,50	1.340.932.529,50	1.075.742.770,50	1.126.804.582,50
	- TPI Tasikagung II	1.523.477.190,00	1.806.312.900,00	2.008.541.470,00	1.860.815.600,00	1.728.080.900,00
	- TPI Tanjungsari	107.562.697,00	32.901.254,00	2.807.370,00	1.472.370,00	1.811.350,00
	- TPI Tunggulsari	4.214.580,00	14.052.210,00	4.157.210,00	1.926.400,00	3.307.360,00
2.	BBI Pamotan (Rp.)	15.000.000,00	15.050.000,00	20.500.000,00	21.000.000,00	20.000.000,00
3.	Sewa Gudang dan Kios	334.019.641,00	345.287.841,00	297.729.358,00	323.781.776,00	-
4.	Sewa Basket & Jasa Es	56.416.000,00	171.442.000,00	162.551.000,00	165.035.000,00	136.392.000,00
	J u m l a h	12.126.082.094,00	12.193.230.717,00	9.264.436.605,00	8.804.038.249,00	9.641.811.462,50

Tabel II.7.

Target dan Realisasi Produksi dan Nilai Produksi Pada Tahun 2017 – 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Perikanan Tangkap	kg		79.644.775	101.222.648	112.962.055	113.955.461	78.856.213	96.402.522	110.747.112	111.721.041	97.943.156
2.	Perikanan Budidaya	kg		6.400.406	6,432,285	6.581.366	6.720.735	6.454.940	6.286.757	6.452.320	6.588.959	6.721.482
3.	Garam Rakyat	kg	NA	165.467.700	173.740.350	189.271.200	111.035.568	NA	NA	185.560.000	108.858.400	98.767.000
4.	Pengolahan Hasil Perikanan	kg		195.847.605	171.651.585	171.629.097	131.804.237	193.908.519,75	169.952.064	168.263.821	130.499.245	133.304.979

Tabel II.8.
Target dan Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Pada Tahun 2017 – 2021

No.	Program	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-1	-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. Juta	744,7	697,3	613,8	675,5	0	972,5	704,2	665,6	592	625,4	0	689,8
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. Juta	346,5	157	72,5	75	0	311	326,8	122,9	69,9	65,1	0	192,5
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. Juta	99	16,5	0	0	0	60	98,9	16	0	0	0	-
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. Juta	185,7	0	0	0	0	0	185,7	0	0	0	0	0
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. Juta	158,4	264	96,3	144,5	0	100	156,9	242,1	94,1	134,6	0	83
6	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Rp. Juta	0	0	0,0	0	0	450	0	0	0	0	0	75

No.	Program	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-1	-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Laut	Rp. Juta	0	0	0,0	0	0	50	0	0	0	0	0	50
8	Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	Rp. Juta	175	175	0,0	0	0	125	144,8	73,3	0	0	0	560,5
9	Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat	Rp. Juta	295	200	100,0	0	0	200	247,1	182,3	0	0	0	105
10	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp. Juta	575	2.152,5	1174,3	1425,4	0	3.275,00	546	1856,0	984,6	937,9	0	1.268,00
11	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Rp. Juta	22.105,6	13.261	0,0	0	10.249,10	12.300,00	21.171,8	11622,2	0	0	10.214	25.327,30
12	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Rp. Juta	60	0	92,0	87,2	0	650	57,9	0	77,9	85,3	0	55
13	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Rp. Juta	100,0	1.121,8	50,0	210	0	2.825,00	70,9	874,8	45,4	158,5	0	175

No.	Program	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-1	-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
14	Program Pengembangan Perencanaan, Informasi dan Statistik Perikanan dan Kelautan	Rp. Juta	692	1911,5	0	0	0	640	384,7	1.825	0	0	0	110
15	Program Kelestarian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan	Rp. Juta	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	70
16	Program Peningkatan Kapasitas SDM Perikanan dan Kelautan	Rp. Juta	765	0	0	0	0	880	695,3	0	0	0	0	26,1
17	Program Pengelolaan Sumberdaya Kawasan Pesisir dan Perikanan	Rp. Juta	210	153,5	0	0	0	0	201,4	145,8	0	0	0	0
18	Program Pengawasan dan Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Perikanan	Rp. Juta	250	0	0	0	0	0	222,7	0	0	0	0	0
19	Program Pelestarian Sumberdaya Pesisir dan Perikanan	Rp. Juta	250	25	0	0	0	0	204,4	22,7	0	0	0	0
20	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Rp. Juta	500	0	0	0	0	0	412,1	0	0	0	0	0
21	Program Pengembangan Nelayan Kecil	Rp. Juta	0	0	620	921,4	0	0	0	0	602,3	907,2	0	0

No.	Program	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-1	-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
22	Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	Rp. Juta	0	0	190	250	0	0	0	0	174,7	237,6	0	0
23	Program Pengelolaan TPI Terpadu	Rp. Juta	0	0	21.735,5	11.335,4	0	0	0	0	16.201,9	11.095,9	0	0
24	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Rp. Juta	0	0	0	50	0	0	0	0	0	48,8	0	0
25	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Rp. Juta	0	0	0	0	689,1	0	0	0	0	0	646,7	0
26	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. Juta	0	0	0	0	55,2	0	0	0	0	0	48,2	0
27	Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	Rp. Juta	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	2,7	0
28	Program Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing Perikanan	Rp. Juta	0	0	0	0	141,9	0	0	0	0	0	126,9	0
29	Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Garam	Rp. Juta	0	0	0	0	966,3	0	0	0	0	0	936,4	0

Pada Tabel II.8 di atas dapat dilihat bahwa antara target yang telah ditetapkan, baik dari segi anggaran maupun kegiatan, dengan realisasi capaian yang diperoleh, terdapat ketidaksesuaian. Dengan kata lain ada kegiatan yang tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, tetapi ada pula beberapa kegiatan yang tidak bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, di antaranya adanya kebijakan tertentu dari pimpinan maupun dewan yang harus diakomodir, sementara kegiatan tersebut tidak terdapat dalam Renstra yang telah disusun.

II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

Dalam pengembangan pelayanan di bidang kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang menghadapi beberapa tantangan dan peluang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tantangan diartikan sebagai hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Sedangkan peluang adalah ruang gerak, baik yang konkret maupun yang abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi suatu kegiatan untuk memanfaatkannya dalam usaha mencapai tujuan.

Yang menjadi tantangan dalam pengembangan pelayanan di bidang kelautan dan perikanan antara lain :

- 1) Konflik dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- 2) Kelembagaan masyarakat nelayan dan pembudidaya yang belum mandiri.
- 3) Menurunnya kualitas lingkungan dan perairan laut.
- 4) Menurunnya mutu hasil tangkapan.
- 5) Jauhnya daerah penangkapan ikan.
- 6) Belum optimalnya sarana dan prasarana kelautan dan perikanan.

Sedangkan yang menjadi peluang dalam pengembangan pelayanan di bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Rembang antara lain :

- 1) Komitmen dan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang kelautan dan perikanan.
- 2) Permintaan pasar akan hasil kelautan dan perikanan semakin meningkat.

- 3) Keberadaan mitra usaha kelautan dan perikanan serta peran masyarakat yang tinggi dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan.
- 4) Potensi perikanan, pesisir dan kelautan yang cukup besar.

Dalam mengoptimalkan peluang yang dimiliki untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, ada beberapa langkah yang akan ditempuh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, antara lain :

- 1) Potensi sumber daya Kelautan dan Perikanan dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Sebagai SKPD berfungsi sebagai fasilitator dalam mengembangkan kelembagaan kelautan dan perikanan masyarakat.
- 3) Penegakan hukum dalam pengawasan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan agar dapat dimanfaatkan secara kesinambungan.
- 4) Akselerasi/percepatan melaksanakan perbaikan kualitas lingkungan dengan rehabilitasi hutan bakau dan perairan laut sebagai ekosistem Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- 5) Melaksanakan tindakan preventif dan represif terhadap penanganan ikan dari penangkapan sampai dengan tempat pengolahan ikan dan pengawasan terhadap penggunaan bahan pengawet ikan.
- 6) Peningkatan profesionalisme SDM kelautan dan perikanan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat kelautan dan perikanan.
- 7) Peningkatan sarana dan prasarana baik untuk pengembangan produksi dan pemberdayaan masyarakat sebagai ujung tombak dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan.
- 8) Sinkronisasi pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan bersama dengan semua stake holder.
- 9) Meningkatkan/rehabilitasi sarana dan prasarana kelautan dan perikanan agar dapat Mendorong terciptanya pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan di sentra kegiatan kelautan dan perikanan (TPI) dan masyarakat sekitar.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

Dalam pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Rembang ditemukan beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang. Secara umum permasalahan atau kendala utama yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan kewenangan yang dimiliki, antara lain adalah :

1. Perikanan budidaya masih tradisional, sehingga belum banyak pembudidaya ikan yang sadar untuk mengurus ijin.
2. Belum optimalnya pemanfaatan lahan tambak untuk pengembangan budidaya.
3. Belum semua pembudidaya ikan menerapkan CBIB.
4. Kurangnya kepemilikan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.
5. Terbatasnya kemampuan untuk mengakses modal usaha pembudidayaan ikan.
6. Pengelolaan limbah pengolahan ikan yang belum optimal sehingga mencemari tambak.
7. Menurunnya ketersediaan ikan di area penangkapan kabupaten rembang, sehingga harus menangkap diluar perairan Rembang.
8. Sarana alat tangkap nelayan masih kurang memadai untuk menunjang aktivitas penangkapan.
9. Kurang memadainya sarana dan prasarana tempat pelelangan ikan.
10. Pengolahan ikan masih tradisional, higienisitas proses pengolahan masih kurang.
11. Masih sederhananya pengolahan hasil perikanan yang dilaksanakan sehingga perlu dilaksanakannya diversifikasi produk olahan hasil perikanan.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi serta memanfaatkan peluang yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan, maka disusun program prioritas yang kemudian diimplementasikan dalam rencana kerja Dinas yang mencakup program – program dan kegiatan di setiap bidang. Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang disusun agar dapat memberikan arah dalam rangka mendorong terwujudnya tujuan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Rembang dengan mengatasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Diharapkan dengan program yang tepat akan dapat menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas, sehingga mampu menerapkan dan menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus menyediakan produk perikanan untuk memenuhi konsumsi daerah, bahan baku industri dan melestarikan sumberdaya perikanan dan kelautan yang ada.

III.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dari Kepala Daerah Kabupaten Rembang yang merupakan visi Pemerintah Kabupaten Rembang periode tahun 2021 – 2026 yaitu **“Terwujudnya Rembang Gemilang 2026”**.

Penjabaran visi tersebut sebagai berikut: Rembang Gemilang menggambarkan suatu semangat mewujudkan masyarakat Kabupaten Rembang yang sejahtera dari segi ekonomi, melalui pembangunan pertanian dan industri, serta rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dengan proteksi jaminan sosial yang baik dan mendapatkan pelayanan birokrasi yang prima, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berkembangnya kehidupan demokrasi, dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih mandiri. GEMILANG dapat dimaknai sebagai **GEMati**, **gampIL** dan **gamblANG**.

GEMati adalah terwujudnya Rembang yang ngopeni dan ngayomi warganya untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang sehat, terdidik, memiliki kemampuan ekonomi memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya.

GampIL adalah pembangunan kapasitas sumberdaya manusia dan penanganan secara optimal potensi sumber daya alam yang menempatkan prinsip gampil atau mudah diakses masyarakat.

GamblANG adalah terwujudnya tatanan birokrasi yang mampu mendukung peningkatan pelayanan dan kehidupan sosial yang didasari atas prinsip yang transparan, terukur dan akuntabel

Adapun maksud visi tersebut adalah menggambarkan suatu semangat mewujudkan masyarakat Kabupaten Rembang yang sejahtera dari segi ekonomi, melalui pembangunan pertanian dan industri, serta rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dengan proteksi jaminan sosial yang baik dan mendapatkan pelayanan birokrasi yang prima, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berkembangnya kehidupan demokrasi, dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih mandiri.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa kriteria rumusan misi adalah:

1. Menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan visi daerah;
2. Disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah; dan
3. Disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat.

Berangkat dari pemahaman diatas, maka untuk mencapai Visi Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026 tersebut, akan ditempuh melalui empat (4) misi pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut:

1. Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi.
2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Semakin Berkualitas dan Terproteksi dalam Jaminan Sosial

3. Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.
4. Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal.

Dari misi tersebut di atas, yang terkait langsung dengan pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Rembang adalah misi ke – 3, yaitu Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan. Oleh karena itu dalam penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang tahun 2021 – 2026 akan lebih terkonsentrasi pada misi ke 3.

Dalam rangka pelaksanaan visi dan misi tersebut, maka disusunlah program kegiatan untuk dilaksanakan pada periode tahun 2021 – 2026. Terkait dengan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang telah menyusun program pembangunan sesuai dengan permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.
4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan.
5. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.

III.3. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

Di samping visi dan misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang ini juga mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dimaksudkan agar terdapat sinkronisasi kebijakan dan juga program pembangunan di bidang kelautan dan perikanan di tingkat pusat, provinsi dan daerah.

III.3.1. Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 – 2024

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2019

- 2024 adalah “ **Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**”. Hal ini sejalan untuk mendukung visi pemerintahan, yaitu “ **Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**”.

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN - 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”;
2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;
3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”;
4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

III.3.2. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018– 2023

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang dijadikan salah satu acuan adalah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023, dengan rumusan visi “**JAWA TENGAH BERDIKARI DAN SEMAKIN SEJAHTERA “(tetep) Mboten Korupsi Mboten Ngapusi**”. Makna yang terkandung dalam visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut adalah sebagai berikut :

- **Sejahtera**

Masyarakat Jawa Tengah Sejahtera adalah masyarakat yang tercukupi segala kebutuhan dasarnya secara adil dan merata berprinsip pada peri kemanusiaan dan peri keadilan. Masyarakat sejahtera juga terbebas dari

ketidakmerdekaan, kebodohan, kesakitan, kelaparan, serta ancaman dari perlakuan atau tindak kekerasan fisik maupun non fisik. Dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera akan tercipta hubungansosial yang nyaman dan aman, tanpa adanya diskriminasi SARA, serta tercipta relasi yang dinamis, saling menghargai, saling pengertian, dan toleransi yang tinggi. Ketercukupan kebutuhan masyarakat juga didukung dengan pemenuhan prasarana dan sarana dasar, pelayanan publik, ruang publik, transportasi, serta teknologi yang harus disediakan secara cukup dan menerus, untuk mencapai kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

- **Berdikari**

Berdikari merupakan sebuah tujuan agar masyarakat mampu memenuhi segala kebutuhan dasarnya secara mandiri dan cukup. Dengan begitu, berdikari menjadi sebuah metode untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidupnya berbasis modal pokok milik sendiri, baik sumberdaya alam, manusia, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sedangkan sumberdaya yang berasal dari luar merupakan tambahan apabila diperlukan. Perwujudan masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera dan berdikari dilandasi semangat dan nilai utama Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi. Nilai ini dimanifestasikan dalam sikap, tindakan, dan tingkah laku seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk dapat bersama mencapai kesejahteraan yang berdikari.

Dari visi di atas kemudian diimplementasikan dalam beberapa misi sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepatreformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran pemerintahanKabupaten/Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

III.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dokumen lain yang menjadi pedoman/pertimbangan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang tahun 2021 – 2026 adalah Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Rembang. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang tidak menyimpang dari aturan Tata Ruang Kabupaten Rembang yang telah ditetapkan.

III.4.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang merupakan Kabupaten yang terletak di pantai Utara Pulau Jawa dan merupakan kabupaten dengan potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar, meliputi perikanan laut, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan serta pengelolaan kawasan pesisir. Dalam mengembangkan potensi kelautan dan perikanan ini tentunya ada aturan – aturan yang telah ditetapkan, di antaranya mengenai tata ruang wilayah Kabupaten Rembang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Rembang adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif yang memuat tujuan, kebijakan, strategi, struktur ruang, pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah daerah. Tujuan penataan ruang wilayah daerah ini adalah untuk mewujudkan penataan ruang wilayah Daerah Rembang sebagai kawasan pantai unggulan yang didukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan dan industri dalam keterpaduan pembangunan wilayah utara dan selatan serta antar sektor yang berwawasan lingkungan

Kabupaten Rembang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang Tahun 2011 – 2031 sebagai arahan kebijakan penataan dan ruang wilayah untuk menetapkan ruang untuk peningkatan pengelolaan kelautan dan perikanan, baik perikanan tangkap, perikanan budidaya dan perairan

umum. Berdasarkan RTRW Kabupaten Rembang, beberapa perincian pusat kegiatan terutama yang terkait dengan bidang kelautan dan perikanan dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel III.1.
Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Rembang
Berdasarkan RTRW

No.	Pusat Kegiatan	Wilayah
1.	Pusat Kegiatan Lokal	Perkotaan Rembang
2.	Pusat Kegiatan Lokal promosi	Kecamatan Lasem, Pamotan, Kragan
3.	Pusat Pelayanan Kawasan	Kecamatan Sulang, Sluke, Kaliori, Pancur, Sumber, Bulu, Gunem, Sedan, Sale, Sarang
4.	Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Sedan, Kragan, Lasem, Pancur, Sluke
5.	Kawasan Sempadan Pantai	Kecamatan Kaliori, Rembang, Lasem, Sluke, Kragan, Sarang
6.	Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya	Kawasan perairan P. Gede dan P. Marongan
7.	Kawasan Hutan Bakau	Kecamatan Rembang, Kaliori, Lasem
8.	Kawasan Peruntukan Perikanan	
	i. Kawasan Peruntukan Perikanan Tangkap	Kecamatan Kaliori, Rembang, Lasem, Sluke, Kragan, Sarang.
	ii. Kawasan Peruntukan Perikanan Budidaya Air Tawar	Kecamatan Pamotan, Sale, Rembang, Bulu, Kragan, Sulang
	iii. Kawasan Peruntukan Perikanan Budidaya Air Payau	Kecamatan Kaliori, Rembang, Lasem, Sluke, Kragan, Sarang.
	iv. Sarana dan Prasarana	UPR (Unit Pembenihan Rakyat), BBI (Balai Benih Ikan) Pamotan, Pengembangan PPP Tasikagung menjadi PPN Tasikagung sebagai sentra kelautan dan perikanan, pengembangan TPI (Ds. Tunggulsari, Ds. Tanjungsari, Ds. Tasikagung, Ds. Pasar Banggi, Ds. Pangkalan, Ds. Pandangan, Ds. Karang Lincak, Ds. Karang Anyar, Ds. Sarang, Kel. Pacar, Ds.

No.	Pusat Kegiatan	Wilayah
		Gegunung Wetan, Ds. Kabongan, Ds. Binangun).
9.	Klaster Industri Garam	Kecamatan Kaliori, Rembang, Lasem, Sluke, Kragan, Sarang.
10.	Klaster Olahan Perikanan	Kecamatan Kaliori, Rembang, Lasem, Sluke, Kragan, Sarang.

Di dalam RTRW tersebut juga disebutkan mengenai kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Rembang, di mana disebutkan bahwa kebijakan penataan ruang wilayah untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan ada di bagian Utara. Adapun strategi yang akan dilaksanakan dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan tersebut antara lain :

- a. Mengembangkan kawasan peruntukan perikanan tangkap;
- b. Mengembangkan kawasan peruntukan perikanan budidaya;
- c. Mengembangkan kawasan wisata bahari terpadu;
- d. Mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan perikanan;
- e. Mengembangkan kawasan pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum;
- f. Mengembangkan kawasan pesisir kabupaten sebagai kota pantaiunggulan;
- g. Menetapkan dan mengembangkan kawasan minapolitan;
- h. Mempertahankan luasan lahan perikanan darat yang telah ditetapkan sebagai kawasan minapolitan;
- i. Mengembangkan kawasan minapolitan yang meliputi subsistem hulu, subsistem usaha perikanan, subsistem hilir dan subsistem penunjang; dan
- j. Mengembangkan sentra-sentra produksi dan usaha berbasis perikanan, dan dilengkapi dengan sarana dan pra-sarana yang memadai sebagai pendukung keanekaragaman aktivitas ekonomi.

III.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian lingkungan hidup strategis merupakan serangkaian analisa sistematis menyeluruh dan partisipatif dari pemangku kepentingan

(stakeholder) pembangunan daerah. Dengan demikian kaidah pembangunan berkelanjutan dapat terintegrasi dalam suatu kebijakan, perencanaan dan atau program kegiatan di bidang kelautan dan perikanan yang memiliki potensi dampak dan atau resiko terhadap kelestarian lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan yang terjadi sering dipicu oleh aktivitas manusia dalam merealisasikan kegiatan bidangkelautan dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tanpa disadari dapat memicu kerusakan lingkungan.

Di samping itu pencemaran air, udara, limbah B3 dan sampah yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun dapat menurunkan fungsi ekologis lingkungan serta berdampak negative bagi masyarakat. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan peran serta dari semua pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pengelolaan limbah, meminimalisasi limbah serta kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan untuk menjaga kelestarian lingkungan sangat berperan. Aktivitas masyarakat dalam pembangunan kelautan dan perikanan biasanya hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, sehingga sering mengabaikan kepentingan menjaga fungsi lingkungan hidup. Hal ini mengakibatkan tidak adanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, social budaya dan lingkungan hidup yang di kemudian hari dapat menimbulkan ketidakadilan antar kelompok masyarakat dan antar generasi.

Penilaian pendiskripsian pengaruh terhadap isu-isu pembangunan di bidang kelautan dan perikanan merupakan penilaian positif. Hal ini dapat dilihat pada isu kesenjangan sosial karena pembangunan di bidang kelautan dan perikanan dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi pengangguran yang selanjutnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan optimalnya produksi dan produktifitas kelautan dan perikanan dapat mengarah kepada penyediaan bahan baku industri yang mendukung industri pengolahan, pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sedangkan penilaian negatif, yaitu pada isu kerusakan lingkungan sebagai akibat pembangunan dibidang kelautan dan perikanan, di mana aktivitas tersebut mendorong perubahan fungsi lahan dan berkurangnya daerah resapan air. Disamping itu, pencemaran lingkungan dari kegiatan industri kelautan dan perikanan berpotensi menimbulkan polusi air dan udara. Dampak lebih lanjut yang dapat terjadi antara lain

bencana alam karena adanya alih fungsi lahan yang tidak mempertimbangkan pemanfaatan tanah, air maupun sumber daya alam lainnya. Dalam menjalankan program di bidang kelautan dan perikanan diperlukan serangkaian upaya untuk mengurangi dampak negatif dan/atau resiko negatif atas pelaksanaan program tersebut. Upaya ini diharapkan dapat mendukung pelestarian dan konservasi lingkungan hidup. Perkiraan pengaruh kumulatif kegiatan di bidang kelautan dan perikanan ini di satu sisi dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, sebaliknya dapat pula menimbulkan pencemaran lingkungan.

III.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Dari permasalahan yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang serta hasil telaahan dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang, Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Kabupaten Rembang serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Rembang, maka ditentukanlah isu – isu strategis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang. Dalam penentuan isu strategis ini juga mempertimbangkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mengelola potensi kelautan dan perikanan yang ada. Ada tiga isu strategis utama yang terkait dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Rembang di bidang kelautan dan perikanan sebagaimana yang diatur dalam Kewenangan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu :

1. Belum optimalnya produksi perikanan budidaya yang cenderung menurun dampak pandemi covid-19;
2. Belum optimalnya produksi perikanan tangkap;
3. Belum optimalnya peningkatan nilai tambah pengolahan hasil perikanan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

IV.1 Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai **Idealistik**, yaitu mengandung nilai – nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil, dan **Jangkauan ke depan** yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun atau lebih sebagaimana yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Investasi Terhadap Ekonomi Daerah

IV.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sehingga tujuan dapat dijabarkan lebih dari satu sasaran.

Sasaran yang ditetapkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dalam mencapai tujuan di atas antara lain :

1. Meningkatnya Produksi Perikanan.

Adapun keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator kinerja dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1.
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
 Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KINERJA TUJUAN/SASARAN					
				TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Misi III : “ Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan ”									
1									
	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Investasi Terhadap Ekonomi Daerah	Meningkatkannya Produksi perikanan	Presentase Pertumbuhan Produksi Perikanan	1	1	1	1	1	1

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam bab ini dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang guna mewujudkan Rembang Gemilang Tahun 2026.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif dalam mencapai tujuan dari rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang. Strategi yang akan diambil dalam menjawab permasalahan-permasalahan pembangunan sektor kelautan dan perikanan adalah :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas nelayan yang didukung teknologi informasi terpadu dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap;
2. Penggunaan benih dan induk unggul yang didukung penerapan teknologi, produksi pakan dan lingkungan perairan yang kondusif;
3. Peningkatan mutu produk dan jaminan keamanan pangan usaha pengolahan dan pemasaran tradisional serta mendorong usaha pengolahan dan pemasaran modern untuk berorientasi ekspor;
4. Peningkatan produksi garam yang berkualitas, terintegrasi, dan berteknologi;
5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan, peningkatan kesadaran dalam mengurus izin dan pencegahan konflik.

Sebagai tindak lanjut dari strategi diatas ditetapkanlah arah kebijakan yang lebih bersifat operasional yang diharapkan mampu menyelesaikan akar permasalahan yang dihadapi masyarakat selama ini. Arah kebijakan yang akan diambil dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Perlindungan kepentingan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, melalui:
 - a. pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap
 - b. pemberdayaan usaha perikanan tangkap skala kecil

- c. pengembangan sarana dan prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - d. Pengembangan kartu nelayan yang terintegrasi dengan sistem database
2. Pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan melalui Peningkatan peningkatan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, dan peningkatan kerjasama antar daerah dan antar sektoral
 3. Peningkatan produksi perikanan budidaya, melalui:
 - a. peningkatan kemampuan teknis pembudidaya ikan, terutama penerapan Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPIB)
 - b. Intensifikasi budidaya ikan air payau dan tawar
 - c. pengembangan pakan ikan mandiri berbahan baku lokal
 - d. peningkatan sarana dan prasarana perbenihan
 - e. penerapan dan pemanfaatan teknologi budidaya
 - f. Pengembangan kawasan budidaya vanamei
 4. Pengembangan produk benih dan induk unggul tahan penyakit melalui:
 - a. pemenuhan jaminan mutu, keamanan benih dan induk ikan dan lingkungan budidaya yang kondusif
 5. Optimalisasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, melalui :
 - a. pemenuhan kebutuhan bahan baku;
 - b. peningkatan konsumsi ikan
 - c. peningkatan produk yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan pangan, teknologi, sanitasi dan higienis
 - d. pemberian akses dan pembinaan untuk pencapaian Seritikat Kelayakan Pengolahan (SKP) atau sertifikat yang diberikan kepada Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikanyang Baik / GMP (*Good Manufacturing Practices*) dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar (*Standar Sanitation Operating Procedure (SSOP)*)
 6. Pengembangan usaha produksi garam melalui integrasi lahan, penerapan teknologi dan tata kelola logistik garam

Selanjutnya tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan disajikan secara lengkap dalam Tabel 5.1

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Kelautan dan Perikanan

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	
1	Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan dan investasi terhadap ekonomi daerah	Meningkatnya Produksi perikanan	1. Peningkatan produksi dan produktivitas nelayan yang didukung teknologi informasi terpadu dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap	1	Perlindungan kepentingan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, melalui:
				a	pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap
				b	pemberdayaan usaha perikanan tangkap skala kecil
				c	pengembangan sarana dan prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
				d	Pengembangan kartu nelayan yang terintegrasi dengan sistem informasi database
				2	Pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan melalui peningkatan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, dan peningkatan kerjasama antar daerah dan lintas sektoral
				3	Peningkatan produksi perikanan budidaya, melalui:
				a	Peningkatan kemampuan teknis pembudidaya ikan, terutama penerapan Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPIB)
			b	Intensifikasi budidaya ikan air payau dan laut dan tawar	
			c	pengembangan pakan ikan mandiri berbahan baku lokal	
			d	peningkatan sarana dan prasarana perbenihan	
			e	penerapan dan pemanfaatan teknologi budidaya	
			f	Pengembangan kawasan budidaya	
			4	Pengembangan produk benih dan induk unggul tahan penyakit melalui:	

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
				a pemenuhan jaminan mutu, keamanan benih dan induk unggul dan induk ikan dan lingkungan budidaya yang kondusif
		3. Peningkatan mutu produk dan jaminan keamanan pangan usaha pengolahan dan pemasaran tradisional serta mendorong usaha pengolahan dan pemasaran modern untuk berorientasi ekspor	5	Optimalisasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, melalui :
			a	pemenuhan kebutuhan bahan baku;
			b	peningkatan konsumsi ikan
			c	peningkatan produk yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan pangan, teknologi, sanitasi dan higien
			d	pemberian akses dan pembinaan untuk pencapaian Seritikat Kelayakan Pengolahan (SKP) atau sertifikat yang diberikan kepada Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikanyang Baik / GMP (<i>Good Manufacturing Practices</i>) dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar (<i>Standar Sanitation Operating Procedure (SSOP)</i>)
		4. Peningkatan produksi garam yang berkualitas, terintegrasi, dan berteknologi	6	Pengembangan usaha produksi garam melalui integrasi lahan, penerapan teknologi dan tata kelola logistik garam

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan instrument kebijakan yang berisi satu kegiatan atau lebih yang akan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah. Program merupakan penjabaran langsung dari strategi dan kebijakan yang berguna untuk mencapai tujuan serta sasaran pembangunan. Sedangkan kegiatan merupakan sebuah operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun. Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator kinerja program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

Dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang telah menetapkan berbagai program dan kegiatan untuk tahun 2021 – 2026. Program ini meliputi program yang bersifat intern yang mendukung kegiatan operasional Dinas dan juga kegiatan yang bersifat ekstern yang terkait langsung dengan pengembangan potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Rembang serta masyarakat kelautan dan perikanan. Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan kelautan dan perikanan, serta mencapai target sasaran, dibutuhkan dukungan pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD, Dana Alokasi Khusus/DAK), swasta, perbankan dan non perbankan, dan masyarakat. Pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan ini akan digunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat, yakni focus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021 – 2026 tersebut beserta indikator kinerja dan pendanaan indikatifnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
5	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
6	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
7	Administrasi Umum Perangkat Daerah
8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
9	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
1	Keg. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
2	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
3	Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
III	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
1	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
3	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
4	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
IV	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
1	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
V	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
1	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
3	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Tabel 6.1
Realisasi, Penetapan Program Prioritas dan Pendanaan
Tahun 2021-2026

KODE				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEG /SUB. KEG	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET Th. 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD
									2022		2023		2024		2025		2026		
									TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	
3.25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/KOTA	Nilai Sakip OPD	skor		81	81		82		83		84		85		85
					IKM	skor		82	82		84		86		88		90		90
3.25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	80	80	80	110,000	85	115,000	90	115,000	95	115,000	100	120,000	100
3.25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	% dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan kualitas baik	%	80	80	80	35,000	85	35,000	90	35,000	95	35,000	100	35,000	100
3.25	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dok anggaran dengan kualitas baik	%	80	80	80	40,000	85	45,000	90	45,000	95	45,000	100	50,000	100
3.25	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dok evaluasi kinerja dengan kualitas baik	%	80	80	80	35,000	85	35,000	90	35,000	95	35,000	100	35,000	100
3.25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	%	80	80	80	7,210,050	85	7,210,050	90	7,210,050	95	7,210,050	100	7,210,050	100
3.25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	% ASN yang terlayani gaji & tunjangan	%	100	100	100	6,835,050	100	6,835,050	100	6,835,050	100	6,835,050	100	6,835,050	100
3.25	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	% penatausahaan keuangan yang dikelola dengan baik	%	80	80	80	350,000	85	350,000	90	350,000	95	350,000	100	350,000	100

KODE				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEG /SUB. KEG	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET Th. 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD
									2022		2023		2024		2025		2026		
									TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	
3.25	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	% Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah dengan kualitas baik	%	80	80	80	25,000	85	25,000	90	25,000	95	25,000	100	25,000	100
3.25	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% Dokumen Penatausahaan BMD Dengan Kualitas Baik	%	80	80	80	45,000	85	45,000	90	45,000	95	45,000	100	45,000	100
3.25	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD	%	80	80	80	25,000	85	25,000	90	25,000	95	25,000	100	25,000	100
3.25	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	% BMD yang dikelola dengan baik	%	80	80	80	45,000	85	45,000	90	45,000	95	45,000	100	45,000	100
3.25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
3.25	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	% dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik	%	80	80	80	300,000	85	300,000	90	300,000	95	300,000	100	300,000	100
3.25	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	% ASN berkinerja baik	%	80	80	80	150,000	85	150,000	90	150,000	95	150,000	100	150,000	100
3.25	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	% ASN yang telah menerapkan hasil bintek/diklat dengan baik	%	80	80	80	150,000	85	150,000	90	150,000	95	150,000	100	150,000	100
3.25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan pelayanan umum	%	80	100	100	545,000	100	565,000	100	575,000	100	585,000	100	585,000	100
3.25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	% pemenuhan pelayanan penerangan bangunan kantor	%	80	100	100	25,000	100	25,000	100	25,000	100	25,000	100	25,000	100

KODE				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEG /SUB. KEG	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET Th. 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD
									2022		2023		2024		2025		2026		
									TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	
3.25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	% pemenuhan penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	%	80	80	80	35,000	85	35,000	90	35,000	95	35,000	100	35,000	100
3.25	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	% pemenuhan penyediaan peralatan rumah tangga	%	80	80	80	35,000	85	35,000	90	35,000	95	35,000	100	35,000	100
3.25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	% pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	%	80	80	80	40,000	85	50,000	90	55,000	95	60,000	100	60,000	100
3.25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	% pemenuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	%	80	80	80	35,000	85	35,000	90	35,000	95	35,000	100	35,000	100
3.25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	% pemenuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	%	80	80	80	35,000	85	35,000	90	35,000	95	35,000	100	35,000	100
3.25	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	% pemenuhan Penyediaan Bahan/Material	%	80	80	80	40,000	85	50,000	90	55,000	95	60,000	100	60,000	100
3.25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	% rekomendasi hasil rapat koordinasi yang ditindaklanjuti	%	80	80	80	150,000	85	150,000	90	150,000	95	150,000	100	150,000	100
3.25	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah SIM Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Aplikasi	1	0	2	150,000	2	150,000	2	150,000	2	150,000	2	150,000	2
3.25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	SIM		80	80		85		90		95		100		100

KODE				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEG /SUB. KEG	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET Th. 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		
									2022		2023		2024		2025			2026	
									TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)		TARGET	Rp.(000)
					% kesesuaian spesifikasi BMD saat proses pengadaan barang/jasa	%	100	100	100		100		100		100		100		
3.25	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Unit	0	0	3	150,000	2	50,000	0	-	0	-	0	-	0
3.25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket	135	0	2	150,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0
3.25	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paker	11	0	2	6,000,000	1	2,500	0	-	0	-	0	-	0
3.25	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	10	0	2	450,000	1	150,000	0	-	0	-	0	-	0
3.25	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	10	0	2	200,000	1	100,000	0	-	0	-	0	-	0
3.25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Pelayanan Penunjang Perkantoran	%		100	100		100		100		100		100		100
3.25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	% pelayanan surat menyurat dengan baik	%	100	100	100	15,000	100	15,000	100	15,000	100	15,000	100	15,000	100

KODE				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEG /SUB. KEG	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET Th. 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		
									2022		2023		2024		2025			2026	
									TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)		TARGET	Rp.(000)
3.25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	% pemenuhan pelayanan komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan baik	%	100	100	100	130,000	100	130,000	100	130,000	100	130,000	100	100	
3.25	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	% Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	80	80	80	75,000	85	75,000	90	80,000	95	80,000	100	80,000	100
3.25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	% pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan dengan baik	%	100	100	100	96,000	100	100,000	100	100,000	100	100,000	100	100,000	100
3.25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% BMD dengan kondisi Baik	%	80	80	80		85		90		95		100		100
3.25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	% kendaraan dinas dengan kondisi baik	%	80	80	80	96,000	85	100,000	90	100,000	95	100,000	100	100,000	100
3.25	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	% mebelair dengan kondisi baik	%	80	80	80	25,000	85	25,000	90	25,000	95	25,000	100	25,000	100
3.25	01	2.09	07	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	% peralatan/perengkapan kantor dengan kondisi baik	%	80	80	80	25,000	85	25,000	90	25,000	95	25,000	100	25,000	100
3.25	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	% Gedung kantor dan bangunan lainnya dengan kondisi baik	%	80	80	80	200,000	85	200,000	90	200,000	95	200,000	100	200,000	100
3.25				URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN															

KODE				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEG /SUB. KEG	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET Th. 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		
									2022		2023		2024		2025			2026	
									TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)		TARGET	Rp.(000)
3.25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	%	111,721,041	0.5	0.5	4,335,000	0.5	4,990,000	0.5	5,025,000	0.5	5,280,000	0.5	5,535,000	114,514,067
3.25	03	2.01		Keg. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	% Sarana dan prasarana perikanan tangkap dalam kondisi baik	%	15	25	25	2,200,000	25	2,470,000	25	2,500,000	25	2,750,000	25	3,000,000	90
					% Cakupan Data Perikanan Tangkap	%	NA	1	50	75,000	75	50,000	80	50,000	85	50,000	95	50,000	95
3.25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	% Cakupan Data Perikanan Tangkap	%	NA	1	50	75,000	75	50,000	80	50,000	85	50,000	95	50,000	95
3.25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	% prasarana perikanan tangkap dalam kondisi baik	%	15	25	25	1,100,000	25	1,235,000	25	1,250,000	25	1,375,000	25	1,500,000	25
3.25	03	2.01	03	Penjamin Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	% sarana perikanan tangkap dalam kondisi baik	%	15	25	25	1,100,000	25	1,235,000	25	1,250,000	25	1,375,000	25	1,500,000	25

KODE				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEG /SUB. KEG	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET Th. 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		
									2022		2023		2024		2025			2026	
									TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)		TARGET	Rp.(000)
3.25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	% Kenaikan Kelas Kelompok Nelayan	%	NA	3	3	785,000	3	695,000	3	700,000	3	705,000	3	710,000	3
3.25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan yang mendapatkan pelatihan	Kelompok	15	25	25	285,000	25	235,000	25	250,000	25	265,000	25	280,000	25
3.25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelembagaan Nelayan yang difasilitasi pembentukannya dan atau Pengembangannya	Kelompok	15	25	25	285,000	25	235,000	25	250,000	25	265,000	25	280,000	25
3.25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Nelayan yang mendapatkan Akses Permodalan, dan atau Akses Kemitraan Usaha	Kelompok	NA	15	17	215,000	19	225,000	21	200,000	23	175,000	25	150,000	25
3.25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kenaikan Nilai raman (Rp)	(Rp.)	9,400,000,000	1.500.000		1,275,000		1,775,000		1,775,000		1,775,000		1,775,000	11,400,000,000

KODE				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEG /SUB. KEG	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET Th. 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		
									2022		2023		2024		2025			2026	
									TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)		TARGET	Rp.(000)
3.25	03	2.03	01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Kapal Perikanan yang difasilitasi Pelelangan Ikan di TPI	%	NA	80	82	275,000	84	275,000	86	275,000	88	275,000	90	275,000	90
3.25	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kenaikan Nilai raman (Rp)	(Rp.)	9,400,000,000	1.500.000		1,000,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000	11,400,000,000
3.25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan Budidaya		450,946,129,132	1.25	1.25	3,870,000	1.25	3,445,000	1.25	2,730,000	1.25	2,785,000	1.25	2,810,000	479,130,262,203
3.25	04	2.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi ijin usaha perikanan budidaya sesuai SOP	Angka	NA	25	30	70,000	35	90,000	40	110,000	45	130,000	50	140,000	50
3.25	04	2.01	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi	Jumlah Perizinan Perikanan Budidaya yang difasilitasi	%	NA	25	30	35,000	35	45,000	40	55,000	45	65,000	50	70,000	50

KODE				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEG /SUB. KEG	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET Th. 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD
									2022		2023		2024		2025		2026		
									TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	
				Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing															
3.25	04	2.01	02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Meningkatkan Pelayanan Perizinan budidaya	%	NA	25	30	35,000	35	45,000	40	55,000	45	65,000	50	70,000	50
3.25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	% Kenaikan Kelas Pokdakan, Kugar	%	NA	1.25	1.25	1,035,000	1.25	1,090,000	1.25	1,120,000	1.25	1,120,000	1.25	1,120,000	1.25
3.25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya yang mendapatkan	Orang	55	80	85	555,000	90	575,000	100	585,000	110	585,000	120	585,000	120

KODE				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEG /SUB. KEG	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET Th. 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		
									2022		2023		2024		2025			2026	
									TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)		TARGET	Rp.(000)
					fasilitas pelatihan														
3.25	04	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Fasilitasi akses permodalan untuk POKDAKAN/KUGAR dan kemitraan Usaha	Kelompok	53	10	12	215,000	14	225,000	16	235,000	18	235,000	20	235,000	20
3.25	04	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Fasilitasi pembentukan POKDAPAN/KUGAR dan kemitraan usaha	Kelompok	10	10	12	135,000	14	155,000	16	165,000	18	165,000	20	165,000	20
3.25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase POKDAKAN, KUGAR dan masyarakat yang menerapkan inovasi teknologi tepat guna yang direkomendasikan	%	45	80	82	130,000	84	135,000	86	135,000	88	135,000	90	135,000	90
3.25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	% prasarana pembudidayaan ikan dan	%	NA	15	20	2,765,000	25	2,265,000	30	1,500,000	35	1,535,000	40	1,550,000	

KODE				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEG /SUB. KEG	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET Th. 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		
									2022		2023		2024		2025			2026	
									TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)		TARGET	Rp.(000)
					garam dalam kondisi baik														
					Laporan perikanan budidaya dan garam yang dikelola dengan baik	Dokumen	NA	1	1	35,000	1	45,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1
3.25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen data dan informasi pembudidayaan ikan	Paket	NA	1	1	35,000	1	45,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1
3.25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi prasarana budidaya	Paket	5	10	10	155,000	10	205,000	10	225,000	10	250,000	10	250,000	10
3.25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana budidaya yang disediakan dalam kondisi baik	Paket	5	20	20	575,000	20	575,000	20	575,000	20	575,000	20	575,000	20
3.25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Benih Unggul	Ekor	127,275	135,750	150,000	175,000	165,000	200,000	180,000	200,000	195,000	200,000	210,000	200,000	210,000

KODE				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEG /SUB. KEG	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET Th. 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD
									2022		2023		2024		2025		2026		
									TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	
3.25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembinaan dan money budidaya perikanan darat	Kali/th	NA	6	6	25,000	8	40,000	10	50,000	12	60,000	15	75,000	15
3.25	04	2.04	06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Cakupan perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk budidaya ikan	%	NA	75	80	1,800,000	85	1,200,000	90	400,000	95	400,000	95	400,000	95
3.25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	% Usaha perikanan budidaya yang taat peraturan	%	NA	25	25	100,000	35	100,000	45	100,000	50	100,000	75	100,000	75
3.25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	% Cakupan Pengawasan terhadap Usaha perikanan budidaya	%	NA	75	80	100,000	85	100,000	90	100,000	95	100,000	95	100,000	95
3.25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Usaha perikanan tangkap yang taat peraturan	%	NA	75	80	50,000	85	50,000	90	50,000	95	50,000	95	50,000	95

KODE				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEG /SUB. KEG	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET Th. 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		
									2022		2023		2024		2025			2026	
									TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)		TARGET	Rp.(000)
				yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota															
3.25	05	2.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Usaha perikanan budidaya yang taat peraturan	%	NA	75	80	50,000	85	50,000	90	50,000	95	50,000	95		
3.25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi hasil perikanan	%	130,499,245	1.25	1.25	1,825,000	1.25	1,775,000	1.25	1,650,000	1.25	1,660,000	1.25	1,700,000	138,655,448
3.25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	% Cakupan Data Pengolahan Perikanan	%	NA	75	80	250,000	85	225,000	90	75,000	95	75,000	95	75,000	95
3.25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	% Cakupan Data Pengolahan Perikanan	%		75	80	250,000	85	225,000	90	75,000	95	75,000	95	75,000	95

KODE				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEG /SUB. KEG	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET Th. 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		
									2022		2023		2024		2025			2026	
									TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)		TARGET	Rp.(000)
3.25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah produk pengolahan perikanan yang bersertifikat	Unit	10	15	15	450,000	18	375,000	20	375,000	25	375,000	30	375,000	30
3.25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Usaha yang Bersertifikat ijin Usaha	Unit	10	15	15	450,000	18	375,000	20	375,000	25	375,000	30	375,000	30
3.25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Angka konsumsi ikan	Kg/Kapita	37.74	38.9	40.92	1,125,000	43.7	1,175,000	45.67	1,200,000	47.49	1,210,000	49.41	1,250,000	49.41
3.25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Kg/Kapita	37.74	38.9	40.92	450,000	43.7	475,000	45.67	475,000	47.49	485,000	49.41	500,000	49.41
3.25	06	2.03	01	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Perikanan yang terfasilitasi	Kelompok	10	15	15	675,000	18	700,000	20	725,000	22	725,000	25	750,000	25

Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang
RPJMD Perubahan Tahun 2021-2026

No	Urusan/Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	
					2020		2021		Tgt	Rp. (000)
					Tgt	Rp. (000)	Tgt	Rp. (000)		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	Urusan Kelautan dan Perikanan									
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum	%	90	1,054.60	95	1,969.00	95	1,969.00
		Kegiatan Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	800.60	100	1,329.00	100	1,329.00
		Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	%	100	177.50	100	410.00	100	410.00
		Kegiatan Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	Persentase Pengelolaan Manajemen Kepegawaian yang dilakukan tepat waktu	%	100	45.00	100	145.00	100	145.00
		Kegiatan Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan	Persentase Pelaporan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	%	100	31.50	100	85.00	100	85.00
	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Sakip (Formulasi : [Jumlah Capaian Indikator Kinerja/Jumlah Target Indikator Kinerja] X 100%)	%	100	90.00	100	230.00	100	230.00
		Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Jumlah indikator kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan	%	100	45.00	100	110.00	100	110.00

No	Urusan/Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	
					2020		2021		Tgt	Rp. (000)
					Tgt	Rp. (000)	Tgt	Rp. (000)		
		Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah capaian indikator kinerja	%	100	120.00	100	120.00	1	85.00
	Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik		Persentase Informasi Yang Disampaikan Ke Publik (Formulasi : [Jumlah Informasi Yang Disampaikan Publik/Jumlah Informasi Publik Yang Wajib Disampaikan] X 100%)	%	3	10.00	4	50.00	4	50.00
		Kegiatan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik	Persentase jumlah informasi yang disampaikan ke publik	%	100	10.00	100	50.00	100	50.00
	Program Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing Perikanan		Persentase Produksi Hasil Olahan Perikanan	%	2	905.00	2	2,850.00	2	2,850.00
		Kegiatan Pengolahan dan Peningkatan Daya Saing Perikanan	Jumlah Produksi Usaha Olahan Perikanan	Unit	10	105.00	10	600.00	10	600.00
		Kegiatan Kemitraan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah Kemitraan Produk Olahan Hasil Perikanan	Unit	10	150.00	10	750.00	10	750.00
		Kegiatan Pengembangan Pelaku Usaha Industri Rumahan Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Industri Rumahan (IR) Perikanan Keluarga Miskin	Orang	10	100.00	10	150.00	10	150.00
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap		Jumlah Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan	%	5	16,045.00	5	350.00	5	350.00
		Produksi dan Sarana Prasarana Kenelayanan	Jumlah data statistik setoral yang tersedia	Unit	3	11,200.00	3	43,250.00	3	43,250.00
		Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	Jumlah Nelayan yang Terfasilitasi Asuransi Nelayan	Orang	10	415.00	10	2,900.00	10	2,900.00
			Persentase Permasalahan	%	100		100		100	

No	Urusan/Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	
					2020		2021		Tgt	Rp. (000)
					Tgt	Rp. (000)	Tgt	Rp. (000)		
			Nelayan yang Tertangani							
			Jumlah Nelayan yang Terfasilitasi Pemberdayaan Ekonomi	Orang	10		10		10	
		Pengelolaan TPI Terpadu	Jumlah Raman (Persentase Peningkatan Nilai Raman)	%	1	4,630.00	1	6,675.00	1	6,675.00
	Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Garam		Persentase Produksi Perikanan Budidaya	%	1	1,100.00	1	3,900.00	1	3,900.00
2			Persentase Produksi Garam	%	1		1		1	
		Produksi Budidaya Perikanan dan Garam	Jumlah Pelaku Usaha Budidaya Perikanan dan Garam yang Dibina	Unit	25	990.00	25	2,900.00	25	2,900.00
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya dan Garam	Jumlah sarana dan prasarana budidaya perikanan dan garam yg dkembangkan	Unit	3	110.00	3	1,000.00	3	1,000.00
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum	%	2	905.00	2	2,850.00	2	2,850.00
		Kegiatan Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Unit	10	105.00	10	600.00	10	600.00
		Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Unit	10	150.00	10	750.00	10	750.00
3		Kegiatan Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	Persentase Pengelolaan Manajemen Kepegawaian yang dilakukan tepat waktu	Orang	10	100.00	10	150.00	10	150.00

No	Urusan/Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	
					2020		2021		Tgt	Rp. (000)
					Tgt	Rp. (000)	Tgt	Rp. (000)		
		Kegiatan Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan	Persentase Pelaporan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	%	5	16,045.00	5	350.00	5	350.00
	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Sakip (Formulasi : [Jumlah Capaian Indikator Kinerja/Jumlah Target Indikator Kinerja] X 100%)	Unit	3	11,200.00	3	43,250.00	3	43,250.00
		Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Jumlah indikator kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan	Orang	10	415.00	10	2,900.00	10	2,900.00
		Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah capaian indikator kinerja	%	100		100		100	
	Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik		Persentase Informasi Yang Disampaikan Ke Publik (Formulasi : [Jumlah Informasi Yang Disampaikan Publik/Jumlah Informasi Publik Yang Wajib Disampaikan] X 100%)	Orang	10		10		10	
		Kegiatan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik	Persentase jumlah informasi yang disampaikan ke publik	%	1	4,630.00	1	6,675.00	1	6,675.00
	Program Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing Perikanan		Persentase Produksi Hasil Olahan Perikanan	%	1	1,100.00	1	3,900.00	1	3,900.00
		Kegiatan Pengolahan dan Peningkatan Daya Saing Perikanan	Jumlah Pelaku Baru Usaha Olahan Perikanan	%	1		1		1	
		Kegiatan Kemitraan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah Kemitraan Produk Olahan Hasil Perikanan	Unit	25	990.00	25	2,900.00	25	2,900.00

No	Urusan/Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	
					2020		2021		Tgt	Rp. (000)
					Tgt	Rp. (000)	Tgt	Rp. (000)		
		Kegiatan Pengembangan Pelaku Usaha Industri Rumahan Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Industri Rumahan (IR) Perikanan Keluarga Miskin	Unit	3	110.00	3	1,000.00	3	1,000.00
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap		Jumlah Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan	%	2	905.00	2	2,850.00	2	2,850.00
		Produksi dan Sarana Prasarana Kenelayanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Unit	10	105.00	10	600.00	10	600.00
		Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	Jumlah Nelayan yang Terfasilitasi Asuransi Nelayan	Unit	10	150.00	10	750.00	10	750.00
			Persentase Permasalahan Nelayan yang Tertangani	Orang	10	100.00	10	150.00	10	150.00
			Jumlah Nelayan yang Terfasilitasi Pemberdayaan Ekonomi	%	5	16,045.00	5	350.00	5	350.00
		Pengelolaan TPI Terpadu	Jumlah Produksi Raman	Unit	3	11,200.00	3	43,250.00	3	43,250.00
	Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Garam		Persentase Produksi Perikanan Budidaya	%	5	415.00	10	2,900.00	10	2,900.00
			Persentase Produksi Garam	%	100		100		100	
		Produksi Budidaya Perikanan dan Garam	Jumlah Produksi Budidaya Perikanan dan Garam yang	ton			10		10	
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya dan Garam	Jumlah sarana dan prasarana budidaya perikanan dan garam yg dikembangkan	%	1	4,630.00	1	6,675.00	1	6,675.00

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penentuan-penentuan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bab ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan
Mengacu Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026

Misi Ketiga : “ Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan ”

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Awal Periode RPJMD							Akhir Periode RPJMD
1	Presentase Kontribusi PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%	1.72	NA	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	2.7

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan
Mengacu Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Awal Periode RPJMD							Akhir Periode RPJMD
1	Presentase Pertumbuhan Produksi Perikanan	%	-19	1	1	1	1	1		1

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Program
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang
Mengacu Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada
			Awal Periode RPJMD	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode RPJMD
1	Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	-42	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
2	Persentase Produksi Hasil Olahan Perikanan	%	-36	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
3	Persentase Produksi Perikanan Budidaya	%	1.1	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25

Tabel 7.4
 Penetapan Formulasi Indikator Kinerja
 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

No.	Indikator Kinerja	Formulasi	Ket
1.	Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	BPS	Tujuan
2.	Persentase pertumbuhan sektor perikanan (%)	Rata-rata persentase peningkatan produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan perikanan	sasaran
3.	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	{Produksi perikanan tangkap (n) – Produksi perikanan tangkap (n-1)/ Produksi perikanan tangkap tahun (n-1)} x 100%	Program
4.	persentase Peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	{Produksi perikanan budidaya (n) – Produksi perikanan budidaya (n-1)/ Produksi perikanan budidaya tahun (n-1)} x 100%	Program
5.	Persentase Usaha perikanan budidaya yang taat peraturan (%) (%)	{Jumlah pembudidaya yang taat peraturan Tahun n /jumlah pembudidaya se Kabupaten Rembang tahun n} x 100%	Program
6	Persentase peningkatan produksi pengolahan perikanan (%)	{Produksi pengolahan perikanan (n) – Produksi pengolahan perikanan (n-1)/ Produksi pengolahan perikanan tahun (n-1)} x 100%	Program

BAB VIII

P E N U T U P

VIII.1 Kesimpulan

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang ini merupakan sinkronisasi serta penyesuaian terhadap kebijakan daerah yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 dengan mensinergikan tujuan, sasaran, program maupun target-target yang telah ditetapkan.

Perubahan Rencana Strategis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang. Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kelautan dan Perikanan, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Plt. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIS DINAS

TTD

Ir. MOCH SOFYAN CHOLID
Pembina Tk. 1
NIP. 19660729 199303 1 004